

## BAB III

### KONDISI EKONOMI, KEAMANAN, DAN KONTEKS INTERNASIONAL

Pada bab ini dijelaskan mengenai faktor determinan kedua yaitu kondisi ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini adalah kondisi ekonomi dan keamanan yang mendorong Thailand meraih kepentingannya terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian maka terdapat dua (2) sub-bab dalam pembahasan ini, *Pertama*, ekonomi, dalam hal ini melihat aspek kondisi ekonomi Thailand terdampak dari kebakaran hutan dan deforestasi oleh Indonesia. *Kedua*, keamanan dan militer, pada hal ini meninjau aspek militer dan keamanan yang juga mendorong munculnya keinginan Thailand untuk segera meminta Indonesia menyelesaikan masalahnya (deforestasi) karena dampak dari masalah tersebut hingga ke Thailand.

#### 3.1 Kondisi Ekonomi Thailand

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Di mana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa kemampuan ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri negara itu. Oleh karena itu, ekonomi Phuket tidak hanya dari penambangan timah tetapi melalui perkebunan pohon karet yang menjadikan Thailand produsen karet terbesar di dunia dan pariwisata. Ekonomi Phuket bertumpu pada dua pilar: perkebunan pohon karet menjadikan Thailand produsen karet terbesar di dunia dan pariwisata (Pardomuan, 2014).

Sejak 1980-an, pantai berpasir di pantai barat pulau telah dikembangkan sebagai tujuan wisata, dengan Patong, Karon, dan Kata menjadi yang paling populer. Pasca tsunami 2004,

semua bangunan dan objek wisata yang rusak telah dipulihkan. Pembangunan Phuket sedang dikembangkan secara intensif, dengan banyak hotel, apartemen, dan rumah baru sedang dibangun. Phuket memiliki 60.000 kamar hotel untuk 9,1 juta pengunjung tahunannya (Sarosi, 2017).

Laporan dari media DW menyebutkan bahwa kabut asap dari Indonesia menyebar melanda hingga Thailand yang berdampak pada sektor pariwisata penting negara ini. Provinsi-provinsi di semenanjung, Narathiwat, Phuket dan Phangnga terkena dampak yang cukup parah. Akibatnya, industri pariwisata mulai merasakan dampak dari kabut berkepanjangan karena Phuket dan Surat Thani memiliki pantai tropis yang populer di kalangan wisatawan (Domínguez, 2015).

Selain itu, industri pariwisata mulai merasakan dampak dari kabut berkepanjangan karena Phuket dan Surat Thani memiliki pantai tropis yang masih asli yang populer di kalangan wisatawan. Di mana memberikan keterangan ke DW (Domínguez, 2015) yaitu:

*"With the Indonesian haze conditions much more protracted this year than normal, concerns are escalating that the impact of the haze could extend for at least some more weeks,"*  
Rajiv Biswas, Asia-Pacific Chief Economist at global analytics firm IHS,

Keterangan lebih lanjutnya yaitu:

*"December is a crucial peak season for the Thai tourism industry, and if the haze continues during November, it could affect tourism bookings as tourists try to avoid the haze-affected tourism destinations in Southeast Asia,"* (Domínguez, 2015).

Pantai Patong adalah sebuah pantai di pantai barat Phuket. Ini adalah resor wisata utama di Phuket dan berisi pusat kehidupan malam Phuket dan belanja murah di pulau itu. Pantai menjadi populer di kalangan wisatawan barat, terutama orang Eropa, pada akhir 1980-an. Banyak hotel besar dan jaringan hotel berlokasi di Patong. Pada tahun 2017, Phuket menerima sekitar 10 juta pengunjung, kebanyakan dari mereka asing, dengan Cina sebagai kontributor utama. Turis menghasilkan sekitar 385 miliar baht dalam pendapatan, hampir 14 persen dari 2,77 triliun baht yang diterima oleh negara secara keseluruhan (Suchat, 2018).

➤ **Masyarakat (Sektor Kesehatan)**

Seperti disebutkan sebelumnya, kebakaran hutan di Indonesia berdampak terhadap polusi udara yang mengakibatkan kesehatan terganggu. Kebakaran hutan Indonesia menjadi masalah besar di Thailand yang membuat banyak orang sakit, membahayakan lingkungan, dan juga mempengaruhi industri pariwisata (Ping, 2011). Penyebaran polusi udara berbahaya bagi kesehatan manusia karena telah diungkapkan oleh berbagai penelitian terkait dengan berbagai masalah pernapasan, penyakit jantung, dan stroke. Sebagai contoh, WHO melaporkan bahwa polusi udara yang berpotensi menyebabkan timbulnya penyakit hingga resiko kematian dengan rincian presentase 40,0% penyakit jantung iskemik, 40,0% stroke, 11,0% COPD, 6,0% kanker paru-paru, 3,0% stroke (WHO, 2012).

Selain itu, menurut Rayanakorn dampak negatif dari kabut asap adalah meningkatnya gejala saluran pernapasan. Tingkat polusi udara yang tinggi dapat membahayakan kesehatan kita dan juga dapat membunuh orang, terutama ketika gas reaktif dilepaskan ke atmosfer dan orang-orang yang rentan terpapar pada mereka. Asap dari pembakaran terbuka berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia (Rayanakorn, 2010). Tingkat kejadian penyakit pernapasan dan rinitis alergi telah meningkat beberapa kali dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu.

Statistik kesehatan juga menunjukkan bahwa penyakit pernapasan menempati urutan kelima dari sepuluh penyebab kematian utama di Thailand. Sehingga mengenai situasi masalah kualitas udara di dalam dan di luar rumah, indikator penting dari kesehatan dan kualitas udara adalah penyakit pernapasan.

Dengan demikian, adanya kabut asap lintas batas negara yang bersumber dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Di mana dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor ekonomi, pariwisata dan kesehatan. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia maupun negara Asia Tenggara. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia.

### **3.2 Keamanan: Kemampuan Militer Thailand**

Padahal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, 1992, p. 125). Pada sub-bab ini dibahas mengenai aspek kondisi keamanan Thailand yang menjadikan negara tersebut tidak gentar dalam mengkampanyekan ke publik tentang dampak negative deforestasi Indonesia terhadap khususnya negara Thailand

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 1992, pp. 127-130).

#### **3.2.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer**

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, 1992, p. 124). Lebih lanjut William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, 1992, p. 124).

Thailand merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Alokasi Pengeluaran Pertahanan Thailand pada tahun 2018 mencapai 6420 USD Million. Pada 2015, Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand memiliki 357.000 tugas aktif dan 375.349 personel cadangan, mewakili 1 persen populasi 70 juta penduduk Thailand. Persentase ini lebih tinggi dari Amerika, tetapi lebih rendah dari Vietnam di dekatnya. Militer Thailand memiliki lebih dari 1.750 Perwira, jumlah yang membengkak untuk militer dengan ukuran sebesar itu (Cole John, 2015). Menurut seorang pengamat, setiap jenderal Thailand memiliki tiga tujuan: untuk menyelaraskan dirinya dengan politisi dari partai politik; untuk memastikan bahwa dia menerima posisi politik strategis; dan untuk memperkaya dirinya sendiri dan berbagi hasil dengan bawahannya sehingga memastikan kesetiaan mereka (Rappa, 2018).

Berikut merupakan tabel alokasi pengeluaran pertahanan Thailand, yaitu:

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1	2009	5552 USD Million
2	2010	5138 USD Million
3	2011	5292 USD Million
4	2012	5216 USD Million
5	2013	5422 USD Million
6	2014	5462 USD Million

7	2015	5806 USD Million
8	2016	6131 USD Million
9	2017	6306 USD Million
1. 10	2018	6420 USD Million

*Tabel 1: Alokasi Pengeluaran Pertahanan Thailand (Sumber: Diolah oleh penulis).*

Dari data-data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa kapasitas penggunaan militer dapat dinilai kuat dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sikap perlengkapan militernya (Coplin, 1992, p. 137). Jika dilihat militer Thailand dapat dikatakan kuat di Asia Tenggara atau dalam arti yang luas seimbang dengan kekuatan militer Indonesia. Artinya bahwa dalam konteks isu yang dibahas penulis maka secara kalkulasi militer sengketa kabut asap antara Indonesia dan Thailand akan sangat merugikan kedua negara jika sampai meruncing ke konflik langsung kedua negara.

Inilah yang menjadi dasar bahwa kedua negara sebisa mungkin menyelesaikan masalah tersebut secara diplomatis (non-konflik). Disatu sisi alasan diatas juga menekankan bahwa salah satu pihak terlebih khususnya Indonesia mestinya mempertimbangkan aspirasi dari thailan untuk segera menyelesaikan kabut asap. Mengingat asal mula perkara ini dimulai dari Indonesia, sehingga jika tidak hati-hati dan dampak paling buruk apabila terjadi kondisi yang memanas di kedua negara maka yang akan rugi kedua negara karena secara kapabilitas kekuatan tempur sama-sama seimbang.

### **3.2.2 Tingkat Ketergantungan Pada Sumber-sumber Luar Negeri**

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 1992, p. 143).

Thailand merupakan negara dengan wilayah territorial yang sangat luas, serta memiliki salah satu personel militer dan keamanan terbesar di dunia. Tentu, hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mengandalkan impor senjata atau alutista dari luar negara. Pada tahun 2018, tercatat bahwa Thailand merupakan negara importer senjata terbesar ke sepuluh di dunia (Muhaimin, 2018). Dilaporkan oleh agen Interfax-Ukraina bahwa Angkatan Darat Kerajaan Thailand telah menerima setidaknya sekumpulan lima tank tempur utama modern Oplot-T yang dipasok oleh *the Morozov Design Bureau* dan dibangun di Pabrik Malyshev Ukrainian di Kharkiv (Willett, 2018). Perlengkapan merupakan era Soviet, konfigurasi senjata standar akan mencakup senapan smoothbore KBA-3 125mm, senapan mesin koaksial KT-7.62 (PKT) dan senapan mesin anti-pesawat KT-12.7. Jenis ammunition avialalbe termasuk fragmentasi peledak tinggi (HE-FRAG), sabot pembuangan-distabilkan siot sabot (APFSDS) yang dapat menembus baju besi (rompi), peledak anti tank (HEAT) dan peledak gun (GM) yang tinggi. Persyaratan Angkatan Darat Thailand adalah setidaknya untuk 49 MBs Oplot-T (Willett, 2018).

Jenderal Chalermchai juga mengatakan bahwa Thailand akan membeli 34 mobil lapis baja VN-1 dari Cina dengan nilai pesanan \$ 68 juta (Bt 2,3 miliar). Dia mengatakan bahwa keputusan pembelian Thailand bukan masalah aliansi, tetapi bahwa tank dan kendaraan merupakan pilihan yang lebih hemat biaya bagi negara (Willett, 2018). Sedangkan industri di

Thailand juga terlibat dalam proses modernisasi. Panus Assembly, sebuah perusahaan otomotif utama yang berbasis di provinsi Panusnikom telah membangun kembali dan memodernisasi Cadillac Gage V-150 kendaraan lapis baja 4 × 4 (LAV) untuk Royal Thai Navy (RTN). Kendaraan ini awalnya dirancang sebagai mobil lapis baja amfibi. Kendaraan 16 ton, yang sebelumnya rusak selama operasi pemberontak, telah mengalami banyak peningkatan. Ini termasuk armor yang lebih tebal di bagian bawah yang telah ditingkatkan menjadi 16mm, dan armor 12mm di sisi dan permukaan atas. Ada juga mesin 8,9 liter baru Cummins ISL Euro 3 350 hp memberikan kecepatan tertinggi sekitar 110 km / jam. Transmisi otomatis telah ditingkatkan menjadi Allison 4500 dengan enam gigi (Willett, 2018). Kendaraan telah dirancang ulang sebagai HMV-150, dan perusahaan berharap bahwa RTN akan cukup terkesan dengan peningkatan yang dibuatnya sehingga ingin 24 V-150 lainnya dimodifikasi secara serupa.

Angkatan Darat Thailand juga ingin meningkatkan serangan dan armada helikopter utilitasnya. Meskipun tidak ada keputusan yang diumumkan mengenai helikopter serang, Bell Helicopter sangat tertarik untuk menawarkan AH-1Z Cobra yang saat ini menggantikan pendahulunya, AH-1W, di Korps Marinir Amerika Serikat (USMC). RTA juga mengoperasikan sejumlah kecil Huey Cobras AH-1F. Namun penantang lain dikatakan termasuk jajaran luas yang mencakup semua pangkalan secara politis dan termasuk Leonardos AW129 Mangusta, Helikopter Rusia Mil Mi-28, CAIC Z-10 Cina, dan Boeing AH-64F Apache (Willett, 2018).

Armada utilitas sangat lebar dan beragam. Setelah mengandalkan Bell UH-60s dan Bell 212 / 412s selama bertahun-tahun, namun demikian tampaknya ada peluang di sini untuk jenis lain seperti Leonardos AW139, di mana Angkatan Darat sekarang mengoperasikan 10 helikopter dalam peran VIP. Helikopter modern lainnya sedang dipertimbangkan juga termasuk Sikorsky UH-60M untuk pergi dengan armada yang ada UH-60L / Ms (Willett, 2018).



Oleh karena itu, dalam argumentasinya Coplin juga menjelaskan bahwa selain menaksir kemampuan militer perlunya menyadari sumber-sumber kemampuan itu berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang kekuatan militernya makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar dalam menggunakan kekuatan (Coplin, 1992, pp. 90-95).

Telah disebutkan di atas bahwa kekuatan militer Indonesia dan Thailand seimbang dalam artian ketergantungan terhadap luar negeri juga merupakan andalan bagi kekuatan militer pertahanan kedua negara. Kemudian mengingat ketergantungan terhadap luar negeri secara langsung mempengaruhi pengeluaran dalam negeri untuk membiayai pasokan perlengkapan militer dengan kata lain anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Oleh karena itu, Indonesia dan Thailand mencegah terjadinya konflik secara langsung karena aka rugi secara materil. pada kondisinya yang menjadi dasar bahwa kedua negara sebisa mungkin menyelesaikan masalah tersebut secara berdialog (non-konflik). Disatu sisi alasan diatas juga menekankan bahwa salah satu pihak terlebih khususnya Indonesia harusnya mempertimbangkan aspirasi dari thailan untuk segera menyelesaikan kabut asap. Mengingat asal mula perkara ini dimulai dari Indonesia, sehingga jika tidak hati-hati dan dampak paling buruk apabila terjadi kondisi yang memanas di kedua negara maka yang akan rugi kedua negara karena secara kapabilitas kekuatan tempur sama-sama seimbang.

### **3.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer**

Indikator ketiga seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan militer tersebut berfungsi (Coplin, 1992, p. 128). Dalam penelitian ini Thailand merupakan negara yang besar di

ASEAN. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Thailand juga merupakan multi-agama dan multi-etnis (Kuwinpant, 2002).

Pada 1 Januari 2007, tiga orang dipastikan tewas dan lebih dari 38 lainnya cedera. Satu bom meledak di dalam bioskop, tetapi tidak dilaporkan hingga hari berikutnya karena kekhawatiran publisitas negatif. Pagi berikutnya, sebuah bom meledak di sebuah masjid di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara. Pihak berwenang memerintahkan semua acara malam tahun baru publik dibatalkan (Nn, Thai PM blames rivals for blasts, 2007). Polisi Chiang Mai mengklaim petugas kebersihan masjid Chiang Mai membuat bom tersebut. Seorang pria ditangkap di Bangkok karena membawa alat peledak. Namun, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman Bangkok. Perdana Menteri Surayud Chulanont menyalahkan *"old power clique"* sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas pemboman itu, merujuk pada pemerintah yang digulingkan Thaksin Shinawatra serta semua orang yang telah kehilangan kekuatan politik karena kudeta militer 2006 (Nn, Surayud qualifies remarks about bombers, 2007).

Baik partai Thai Rak Thai maupun Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan membantah terlibat. Surayud kemudian mundur dan mengakui bahwa klaimnya bahwa Thaksin-sekutu bertanggung jawab "hanyalah analisis intelijen" dan tidak didasarkan pada bukti atau informasi yang kuat (Nn, Surayud qualifies remarks about bombers, 2007). Surayud mengumumkan bahwa meskipun bom memiliki desain yang serupa dengan yang digunakan oleh para pemberontak di provinsi-provinsi selatan yang didominasi muslim di Thailand, inspeksi lebih dekat menunjukkan tidak ada kaitan dengan mengatakan *"Saya tidak berpikir mereka akan datang ke sini karena mereka bisa hilang di Bangkok"*. Polisi menangkap lebih dari selusin orang, termasuk beberapa perwira militer, karena dicurigai terlibat dalam

pemboman. Pemimpin Junta Jenderal Sonthi Boonyaratglin, dirinya seorang Muslim, mengklaim semua perwira militer tidak bersalah (Nn, Coup leaders tighten grip, 2007).

Investigasi polisi kemudian menentukan bahwa separatis selatan sebenarnya di balik pemboman. Sirkuit peledakan dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat bom itu identik dengan yang digunakan oleh pemberontak Islam. Namun, junta mengecilkan peran separatis selatan, mengklaim mereka telah disewa oleh orang-orang yang terhubung dengan kekacauan politik di Bangkok (Chitradon, 2007). Jika dilihat bahwa ancaman Thailand dapat berasal dari dalam dan luar negeri, kudeta yang menjadi realita transisi politik demokratis Thailand menjadi sebuah ironi yang dihapkan dengan kekuatan militer yang kemudian turut berpartisipasi dalam politik praktis semakin semakin menegasikan terjadinya oligarki dalam kekuasaan. Dampak dari realitas tersebut mungkin membuat masyarakat jenuh, hingga muncullnya kelompok-kelompok politik identitas yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah lewat aksi terorisme tersebut. Masalah-masalah ini yang kemudian menurut penulis dapat merongrong kestabilan domestik Thailand.

Secara teoritis William D. Coplin menerangkan bahwa kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, 1992, p. 124). Hal ini artinya menghendaki kondisi keamanan negara seperti yang digambarkan diatas, bahwa secara kekuatan militer Thailand merupakan negara salah satu negara dengan nilai kekuatan militer tertinggi di ASEAN. Dengan kata lain proses pembuatan kebijakan Thailand terhadap Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan Deforestasi dan kebakaran hutan menjadi tegas karena aspek militer mendukung pola perumusan kebijakan ini, dengan kata lain bahwa aspek militer sifatnya *defence* bahwa bukan untuk menyerang atau angkat senjata melainkan sebagai *back up* perumusan kebijakan, secara teori hal ini dimungkinkan karena

secara psikologis kebijakan yang dikeluarkan akan gertakan psikologis yang memuat pihak kedua dalam hal ini Indonesia mempertimbangkan kemauan Thailand untuk segera mengatasi permasalahan asap.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dalam tulisan ini aspek militer yang merupakan salah satu variabel teori dimengerti hanya sebagai penyempurnaan dari hirarki teori. Karena aspek militer disini tidak memberikan pengaruh signifikan dalam artian bahwa literatur-literatur yang mendukung variabel teori ini sebagai proses pengambilan keputusan tidak di temukan melainkan hanya sebatas penyempurnaan hirarki teori.

### **3.3 Konteks Internasional: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution**

Sub-bab ini membahas mengenai faktor determinan ketiga yaitu konteks internasional. Dalam penjelasannya, William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, 1992, pp. 164-62). Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang dimana secara internasional merespon dampak dari deforestasi, dalam penulisan ini juga penulis menganalisis konten konten perjanjian tersebut.

Salah satu masalah berkelanjutan yang dialami oleh negara-negara ASEAN adalah pencemaran kabut asap lintas bata. Itu terjadi ketika pencemaran asap di satu negara, dengan melintasi perbatasan melalui udara, menyebabkan kerusakan di lingkungan negara lain. Kabut asap di ASEAN biasanya terkait dengan kebakaran hutan. Penyebab utama pencemaran kabut asap adalah kebakaran massal yang secara ilegal ditetapkan untuk menebangi hutan dan membuka jalan bagi perusahaan seperti perkebunan kelapa sawit. Karena kabut asap, kualitas

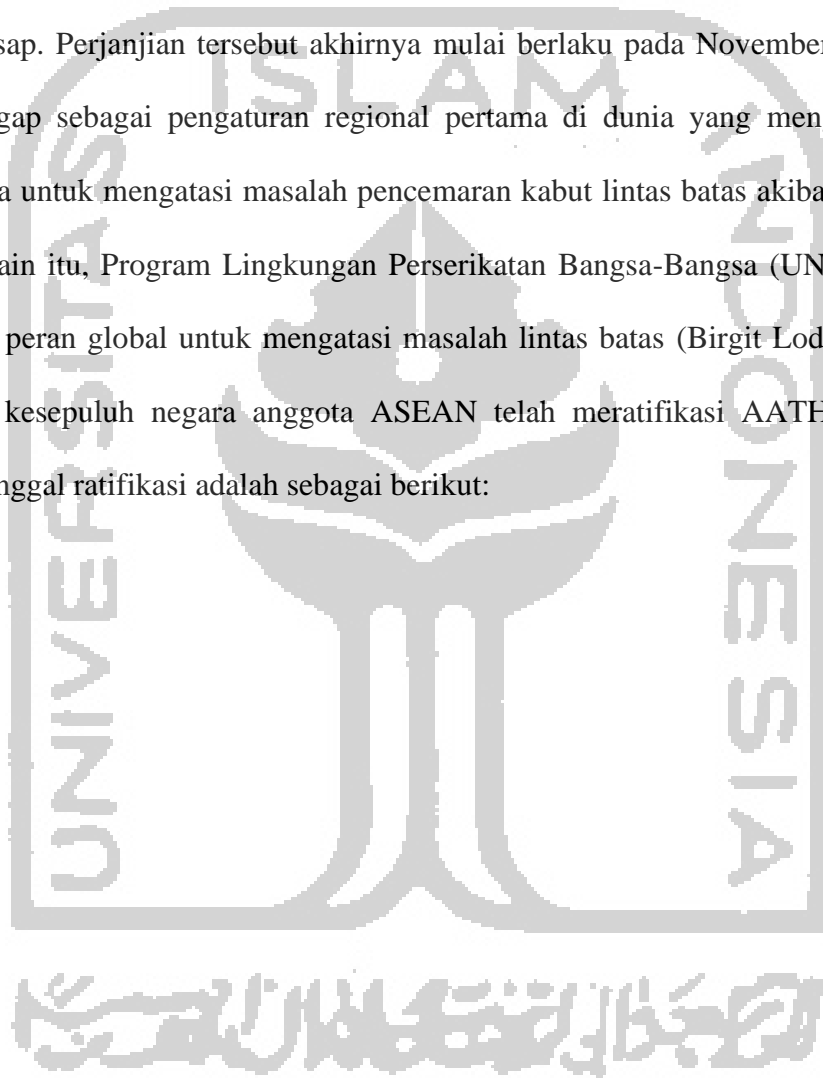
udara menjadi sangat buruk, berbahaya dan mempengaruhi kesehatan masyarakat (Othmad, 1999).

Sejak 1982, negara-negara ASEAN telah mengalami pencemaran kabut lintas batas, yang disebabkan oleh kebakaran yang sebagian besar terjadi di Indonesia (Varkkey, 2013). Iklim Indonesia dapat dikarakteristikan dengan dua musim yaitu kemarau dalam bulan April hingga September dan musim dingin (hujan) Oktober hingga Maret. Bulan-bulan musim kemarau adalah bulan-bulan di mana kebakaran di Indonesia terjadi. Kebakaran semakin memburuk dan parah selama tahun-tahun El Nino (Robert D.Field, 2004). Sejak 1997, Kalimantan dan Sumatra diidentifikasi sebagai pusat bencana kebakaran hutan di Indonesia yang dampaknya hingga ke negara-negara ASEAN.

Tahun 1997-1998 dianggap sebagai pencemaran kabut asap terparah di negara-negara ASEAN. Diperkirakan 45.000 km<sup>2</sup> kebakaran hutan dan kebakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan antara Juli - November 1997. Kebakaran hutan dan kebakaran lahan pada 1997-1998, yang melanda negara-negara ASEAN sangat parah. *United Nations Environment Programme* menyebut kebakaran besar pada tahun 1997 - 1998 sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah (Goldammer, 2001) (Heil & Goldammer, 2001). Total kerugian ekonomi telah diperkirakan adalah \$ 9,3 miliar dalam hal produksi pertanian, perusakan lahan hutan, kesehatan masyarakat, pariwisata, transportasi dan lainnya. Menyadari perlunya mengurangi polusi kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kerja sama regional dalam kabut lintas batas, ASEAN terdiri dari sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, telah mengembangkan ASEAN

*Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* yang telah ditandatangani pada tahun 2002.

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah perjanjian lingkungan yang ditandatangani pada Juni 2002 antara semua anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengurangi polusi kabut asap. Perjanjian tersebut akhirnya mulai berlaku pada November 2003. Perjanjian tersebut dianggap sebagai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara tetangga untuk mengatasi masalah pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Selain itu, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menandainya sebagai model peran global untuk mengatasi masalah lintas batas (Birgit Lode, 2016). Pada 20 Januari 2015, kesepuluh negara anggota ASEAN telah meratifikasi AATHP. Daftar negara anggota dan tanggal ratifikasi adalah sebagai berikut:



NEGARA ANGGOTA	TANGGAL RATIFIKASI	TANGGAL RATIFIKASI / PERSETUJUAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL ASEAN
Brunei Darussalam	27 Februari 2003	23 April 2003
Kamboja	24 April 2006	9 November 2006
Indonesia	14 Oktober 2014	20 Januari 2015
Laos	19 Desember 2004	13 juli 2005
Malaysia	3 Desember 2002	18 Februari 2003
Filipina	1 Februari 2010	4 Maret 2010
Singapura	13 Januari 2003	14 Januari 2003
Thailand	10 September 2003	26 September 2003
Vietnam	24 Maret 2003	29 May 2003
Myanmar	5 Maret 2003	17 Maret 2003

Tabel 2:  
Negara-negara yang meratifikas i ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Sumber; [ratification/\).](http://haze.asean.org/s tatus-of-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Seperti yang dapat kita lihat dari tabel di atas, Malaysia adalah negara pertama yang meratifikasi Perjanjian, dan dari sepuluh anggota ASEAN, Indonesia adalah negara terakhir di antara sepuluh negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian tersebut meskipun Indonesia adalah negara yang terutama bertanggung jawab dalam hal masalah ini. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) terdiri dari 32 Artikel yang dibagi menjadi enam

bagian. Bagian utama dan penting dalam AATHP ini adalah Bagian II yang membahas tentang pemantauan, penilaian, pencegahan dan tanggapan.

Menurut penulis, tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran kabut lintas batas negara akibat kebakaran lahan dan / atau hutan yang harus dikurangi, melalui upaya nasional bersama dan kerja sama regional dan internasional yang intensif (ASEAN, 2002). Perjanjian ini pada dasarnya menyerukan kepada pihak-pihak untuk melakukan, antara lain, *pertama*, langkah-langkah legislatif dan administratif untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan pencemaran kabut lintas batas. *Kedua*, tindakan nasional dan kolktif untuk mengintensifkan kerja sama regional dan internasional untuk mencegah. *Ketiga*, menilai dan memantau pencemaran kabut lintas batas yang timbul dari tanah dan hutan.

Dalam perjalanannya, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* mengalami berbagai dinamika. Di mana dinamika yang dimaksud yaitu terkait perjalanan negara-negara anggotanya dalam meratifikasi perjanjian ini. Sehingga berikut ini merupakan kelemahan dari *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*, yaitu:

### **3.3.1 Keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi**

Indonesia dikatakan sebagai penyebab utama kabut lintas batas di kawasan ASEAN. Setelah satu dekade sejak AATHP mulai berlaku, Indonesia akhirnya meratifikasi perjanjian pada 14 Oktober 2014 dan persetujuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN pada 20 Januari 2015. Alasan di balik ratifikasi Indonesia adalah, ia akan memperkuat profil internasionalnya dan bereaksi terhadap meningkatkan perhatian internasional. Indonesia mengambil kesempatan untuk



mengakhiri masalah kabut asap yang telah menyebabkan gangguan diplomatik di hampir setiap pertemuan ASEAN tentang kebakaran hutan dan polusi kabut asap.

Tidak ada alasan penting bagi parlemen Indonesia untuk tidak meratifikasi perjanjian, dan non-ratifikasi hanya akan terus memperumit upaya diplomasi Indonesia di ASEAN. Sebelum ratifikasi AATHP oleh Indonesia, banyak yang memperkirakan bahwa masalahnya hanya akan selesai jika Indonesia meratifikasi perjanjian. Namun pada bulan September 2015 (setelah Indonesia meratifikasi AATHP) ASEAN diliputi kabut lagi. Kabut itu parah dan dianggap bisa menjadi yang terburuk.

Dengan demikian, apakah polusi asap lintas batas kemungkinan akan berubah setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut masih dipertanyakan. Namun dengan meratifikasi perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia akan mengizinkan negara untuk mencari bantuan dari negara-negara ASEAN lainnya untuk membantu menekan kebakaran. Dengan demikian hal ini dapat meringankan dilema kabut asap melalui kombinasi kolaborasi teknis global dan tindakan hukum negara terhadap perusahaan-perusahaan pria.

### **3.3.2 Prinsip Non Intervensi**

Jika dilihat dari analisis perjanjian penulis diatas, dapat di lihat bahwa dalam perjanjian tersebut memungkinkan pihak eksternal selain ASEAN dapat membantu menyelesaikan masalah kabut asao, ini sama artinya membiarkan orang asing masuk rumah sendiri. Maka dari itu hemat penulis secara prinsipil doktrin Non Intervensi yang di pegang teguh negara ASEAN sedikit banyak tercemar karena mekanisme yang dibuat sendiri oleh negara-negara ASEAN.

Hal ini jelas diatur dalam Pasal 12 AATHP di mana dinyatakan menyatakan bahwa salah satu pihak dalam Perjanjian ini dapat meminta bantuan dari pihak lain jika diperlukan, jika

terjadi kebakaran lahan atau hutan atau polusi asap yang disebabkan oleh kebakaran di dalam wilayahnya. bantuan hanya dapat digunakan atas permintaan dan dengan persetujuan dari pihak yang meminta atau ketika ditawarkan oleh pihak lain, bantuan harus disetujui oleh pihak penerima. Walaupun ini penting untuk menjaga pendekatan berorientasi konsensus ASEAN di depan, hal itu menciptakan kesulitan dalam menemukan solusi pragmatis untuk masalah kabut asap. Misalnya, di masa lalu, Indonesia telah menolak bantuan dari Malaysia dan Singapura mungkin karena alasan reputasi atau kedaulatan.

Kemudian yang menjadi kritik penulis adalah Meskipun Perjanjian bersifat mengikat secara hukum, ada sedikit pertanyaan tentang akuntabilitas dan mekanisme sanksi. Ini diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada mekanisme untuk sanksi atau penyelesaian perselisihan, dan tidak ada mekanisme pemantauan. Pasal 27 AATHP menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, itu akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi. Singkatnya, ASEAN memiliki kapasitas organisasi yang terbatas untuk benar-benar memerangi tantangan yang ditimbulkan. Artinya bahwa karena tidak ada unsur paksaan bagi pelanggar, maka harapan untuk mencegah kebakaran hutan kurang kuat.

Dengan demikian, Thailand menjadi salah satu negara yang ikut aktif dalam menangani kabut asap kiriman dari Indonesia. Thailand juga sangat intens membangun komunikasi dan membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, Thailand merupakan korban dari kabut asap lintas batas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Thailand juga ikut meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Selain itu, Thailand turut membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Permasalahan kabut asap lintas batas negara ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan yang sering terjadi setiap tahun. Namun, kebakaran hutan ini menjadi kasus kebakaran hutan yang parah yaitu terjadi pada tahun 2015 (Hubbusyuhada, 2018, p. 298). Sehingga melihat juga kondisi Thailand yang juga terkena dampak akibat kabut asap lintas batas negara yang merupakan kiriman dari Indonesia. Maka, kondisi internasional sangat mempengaruhi Thailand dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Thailand dalam kebijakan luar negerinya memutuskan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani permasalahan kebakaran hutan di Indonesia yang menyebabkan adanya kabut asap lintas batas negara. Selain itu, melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* Thailand bersama negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini berusaha untuk mengurangi polusi kabut asap lintas batas negara dan mencegah terjadinya deforestasi dan kebakaran hutan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang setiap tahun terjadi kebakaran hutan.

